

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan adanya perkembangan zaman maka adanya perubahan yang kian meningkat, termasuk dunia akuntansi, terutama akuntansi pada sektor publik atau pemerintah yang kian zaman akan adanya perubahan serta perbaikan untuk peningkatan menjadi lebih baik lagi. Untuk bisa mewujudkan hal tersebut, maka dibutuhkan adanya bentuk tanggung jawab dari pemerintah kepada masyarakat. Sebagai kewajiban pemerintah agar semua hak terpenuhi adalah dengan adanya keuangan yang diolah dengan baik. Telah diketahui bahwa kewajiban pemerintah dalam mengolah keuangan dengan transparan, akuntabel serta sesuai dengan pedoman dan undang-undang yang berlaku (Rachmawati & Anik, 2020).

Dalam UU No.32 tahun 2004 terkait otonom suatu daerah yang menjelaskan bahwa maksud tersebut merupakan sebuah wewenang, kewajiban serta hak dari suatu daerah yang otonom agar dapat mengelola, menjalankan suatu urusan dalam pemerintahan oleh sendiri, dan dapat menjalankan suatu kepentingan masyarakat sesuai undang-undang yang berlaku. Pada dasarnya otonom merupakan suatu usaha agar dapat meningkatkan suasana yang sejahtera suatu masyarakat dengan dilakukan adanya beberapa kegiatan guna membangun suatu target yang akan dicapai oleh suatu daerah (Uswatun & Putri, 2023).

Telah diatur dan dijelaskan dalam UU No.17 tahun 2003 terkait masalah keuangan suatu negara serta UU No.23 tahun 2004 tentang bentuk pertanggung jawaban suatu pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan. Salah satu bentuk dari pertanggung jawaban suatu instansi pemerintah yaitu dengan membuat dan memberi sebuah laporan keuangan dengan baik serta benar sesuai dengan aturan yang berlaku dalam Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) (Uswatun & Putri, 2023)

Banyak penelitian yang mengungkapkan bahwa penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, seperti penelitian yang dilakukan oleh Nasution (2020) didalam penelitiannya menyatakan bahwa penerapan standar akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan dengan, karena Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) merupakan pedoman dari penyusunan kegiatan keuangan ataupun akuntansi. Begitupun dengan penelitian yang dilakukan oleh Maisyaroh & Haryanto (2023) dalam penelitiannya menyatakan bahwa penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Selain Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang menjadi pedoman untuk mencapai tujuan serta meningkatkan suatu instansi, dibutuhkan prinsip yang harus diterapkan dalam sebuah instansi pemerintahan. Prinsip tersebut biasa disebut dengan *good governance*. *Good Governance* sangat wajib untuk diimplementasikan dalam instansi pemerintahan di Indonesia, karena dengan adanya *good governance* yang tertanam dalam diri aparatur pemerintahan, maka suatu instansi pemerintahan akan mampu mengelola pemerintahan yang baik dan berkualitas (Maisyaroh & Haryanto, 2023). Suatu struktur pemerintahan tentu mempunyai prinsip didalamnya agar terciptanya tujuan yang baik. Prinsip tersebut seperti adanya keadilan, akuntabilitas, serta responsivitas yang tertuang dalam *good governance*, sebagai landasan atau pedoman yang kemudian diidentifikasi serta dilaksanakan suatu pemerintahan negara (Sari et al., 2023).

Banyak dari hasil peneliti terdahulu yang mengungkapkan bahwa penerapan *good governance* berpengaruh yang signifikan dengan laporan keuangan. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Luh et al. (2020) yang menyatakan bahwa *good governance* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan karena semakin tinggi *good governance* maka akan semakin baik pula kualitas laporan keuangan berbasis akrual yang dihasilkan dan pemerintah dapat dikatakan sudah baik apabila sudah mengatur dan menjalankan kewajibannya mengelola sumberdaya yang ada di daerahnya

agar dapat dikembangkan dan dimanfaatkan dengan baik. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Ardianti (2018) menyatakan bahwa *good governance* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan karena beberapa dinas belum menerapkan prinsip-prinsip dan praktik *good governance*. Beberapa dinas belum pernah mengadakan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan kurang melibatkan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan dinas diluar kegiatan yang bersifat pemerintahan. Namun selain *good governance* yang menjadi pengaruh terhadap laporan keuangan yang berkualitas dan sesuai dengan pedoman Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) (Sari et al., 2023).

Kualitas kinerja dari aparatur pemerintahan sangat penting untuk ditingkatkan dan dijaga keprofesionalitasnya dalam memenuhi tanggung jawab serta tugasnya. Aparatur pemerintahan mempunyai peran yang amat penting, karena aparatur pemerintah menjadi pemeran atau pelaku yang membangun terciptanya sebuah kualitas laporan keuangan yang baik dan benar, serta pelaku yang harus menerapkan pedoman serta prinsip Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan *good governance* dalam melaksanakan tugas serta tanggung jawabnya (Sari et al., 2023). Untuk dapat mewujudkan laporan keuangan yang mempunyai nilai tinggi serta berkualitas dalam suatu instansi pemerintahan maka berkaitan dengan sumber daya aparatur serta kinerja aparatur pemerintahan yang berkualitas juga. Kualitas aparatur pemerintahan menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan, karena kinerja aparatur tersebut berperan besar dalam menentukan kualitas instansi secara menyeluruh. (Rachmawati & Anik, 2020).

Sudah menjadi persoalan masalah umum terkait penataan personil aparatur pemerintahan yang tidak sesuai dengan tata tertib yang tertuang dalam hukum serta pedoman dan prinsip yang berlaku. Seringkali aparatur menyalahgunakan jabatan demi memenuhi kebutuhan pribadi, sehingga menjadi penyebab turunnya kualitas tingkat suatu instansi pemerintahan. Hal itu juga yang dapat menyebabkan turunnya kualitas sebuah laporan keuangan, karena menyalahgunakan keuangan instansi akan berdampak pada hilangnya

akuntabilitas dan transparansi dalam laporan keuangan pemerintah. (Rachmawati & Anik, 2020).

Kualitas kinerja yang dimaksud adalah kualitas kinerja pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon merupakan lembaga instansi pemerintah yang tugas, fungsi serta tata kerjanya diatur tentang tugas, fungsi, dalam peraturan Bupati Kabupaten Cirebon nomer 148 tahun 2023. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon bertugas dalam mengelola perdagangan pengendalian barang pokok dan penting, sarana dan pelaku distribusi, serta perindustrian.

Beberapa penelitian tentang kualitas kinerja aparatur pemerintah Daerah sudah banyak dilakukan oleh beberapa penelitian sebelumnya seperti, Harun (2021) dengan hasil penelitian yang mengungkapkan bahwa kualitas aparatur tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, karena masih banyak pegawai yang belum ditempatkan sesuai dengan bidang atau kemampuannya dan diterbatasnya sumber daya manusia yang dimiliki. Sedangkan menurut Tegor et al. (2021) dalam penelitiannya menyatakan bahwa kualitas kinerja aparatur mempengaruhi kualitas laporan keuangan, karena pegawai menjadi pelaku yang menunjang tercapainya tujuan, mempunyai pikiran, perasaan dan keinginan yang dapat mempengaruhi sikap-sikap negatif hendaknya dihindarkan sedini mungkin.

Dalam Keputusan Menteri Keuangan atau biasa disingkat dengan KMK, bahwa laporan keuangan setiap pemerintah daerah digunakan sebagai informasi dasar anggaran, penilaian sebuah prestasi kerja suatu pemerintah dan digunakan sebagai alat atau bahan motivasi dari evaluasi. Telah tercantum didalam UU Pemerintah nomer 71 tahun 2010 terkait Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang mengartikan bahwa laporan keuangan adalah sebuah posisi serta transaksi keuangan yang dilaporkan secara tertata dengan rapih dan tersusun. Adanya laporan keuangan sendiri mempunyai kegunaan serta manfaat yang penting dalam sebuah lembaga, instansi maupun organisasi untuk terwujudnya transparansi serta akuntabilitas terkait keuangan yang telah

dilakukan didalamnya. Dalam sebuah laporan keuangan didalam pemerintahan harus mampu memberikan informasi yang mengandung manfaat bagi pengguna informasi tersebut dan bertujuan untuk mendapatkan penilaian terkait akuntabilitas dan transparansi keuangan didalamnya yang akan memudahkan pengguna untuk memperoleh keputusan dalam mengambil langkah selanjutnya. Laporan keuangan yang memiliki nilai kualitas tinggi yaitu laporan keuangan yang mampu memenuhi karakteristik secara kualitatif, seperti relevan, andal, dapat dibandingkan serta dapat dipahami maknanya (Ramadhani & Abdul, 2020).

Sebuah kualitas laporan keuangan menjadi hal yang harus diwujudkan oleh instansi pemerintahan dengan memperhatikan pedoman serta aturan yang tertuang dalam Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang dikelola oleh aparaturnya pemerintah dengan memiliki kualitas kinerja yang baik sesuai dengan prinsip dalam *good governance* untuk dapat tercapainya sebuah tujuan serta meningkatkan kualitas instansi melalui kualitas dalam pelaporan keuangan didalamnya (Luh et al., 2020).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka untuk mengetahui lebih dalam mengenai bagaimana Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), *Good Governance*, dan Kualitas Kinerja Aparatur Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon tersebut dengan judul **“Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), *Good Governance*, dan Kualitas Kinerja Aparatur Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat diidentifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu seputar kualitas laporan keuangan dalam suatu lembaga instansi pemerintah, yang mempunyai peran sangat penting dalam sebuah pemerintahan karena menjadi sebuah tolak ukur informasi serta gambaran kondisi sebuah instansi dalam bentuk akuntabilitas serta transparansi keuangan yang benar sesuai dengan pedoman pemerintahan. Penelitian ini lebih condong terkait Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), *Good Governance* dan Kualitas Kinerja Aparatur Pemerintah. Karena pada umumnya Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), *Good Governance* dan Kualitas Kinerja Aparatur suatu pemerintah yang benar atau sudah sesuai dengan pedoman dalam pemerintahan masih jadi alasan laporan keuangan yang kurang baik.

Namun telah diketahui bahwa Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon mampu meraih penghargaan dinas terbaik dalam pelaporan keuangan selama 9 kali berturut-turut (*Sumber Data Primer, Mei 2024*). Berdasarkan hal tersebut, maka terdapat identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Diketahui bahwa beberapa lembaga instansi pemerintahan menyajikan laporan keuangan dibuat hanya untuk sekedar memenuhi tanggung jawab saja, sedangkan laporan keuangan menjadi salah satu hal yang penting untuk media perencanaan, manajerial dan pengawasan pemerintahan.
2. Diketahui bahwa beberapa instansi pemerintah mengalami keterlambatan dalam menyajikan laporan keuangan yang dapat mempengaruhi akurasi informasi keuangan.
3. Diketahui bahwa beberapa instansi pemerintah memberikan pelayanan dan mengambil keputusan dengan lambat, sehingga dapat mempengaruhi efektivitas pemerintahan.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka untuk penjelasan lebih lanjut terkait batasan masalah sebagai bahan pembahasan dalam penelitian untuk dapat dilakukan lebih fokus pada masalah yang terdapat pada penelitian ini. Maka demikian peneliti akan fokus untuk pembahasan lebih mengenai, berikut:

1. Penelitian dilakukan pada aparatur pemerintah pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon.
2. Lingkup penelitian ini hanya kualitas laporan keuangan pada setiap aparatur pemerintah pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon.
3. Penyajian informasi yang diukur yaitu Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), *Good Governance* dan Kualitas Kinerja Aparatur Pemerintah serta pengaruhnya pada kualitas laporan keuangan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Apakah penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon?
2. Apakah penerapan *good governance* berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon?
3. Apakah kualitas kinerja aparatur pemerintah pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada Dinas tersebut?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah pengaruh penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) membuahkan hasil yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon.
2. Untuk mengetahui apakah penerapan *good governance* berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon.
3. Untuk mengetahui apakah kualitas kinerja aparatur pemerintah berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon.

F. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini mempunyai tujuan untuk mendapatkan jawaban yang signifikan dari pokok masalah yang ada didalam penelitian ini dan agar para pihak penyusun laporan keuangan mendapatkan manfaat serta referensi. Adapun manfaat yang dapat diambil untuk manfaat teoritis, peneliti serta bagi peneliti selanjutnya, yaitu:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini memiliki tujuan untuk dapat memberikan pengetahuan serta wawasan terkait Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), *Good Governance* serta Kualitas Kinerja Aparatur Pemerintah dapat mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan pada Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Cirebon.

2. Manfaat bagi penulis

Peneliti berharap dengan adanya penelitian ini, penulis akan mendapatkan pengetahuan serta ilmu baru guna meningkatkan wawasan pada bidang akuntansi terkait pemerintahan yang telah penulis dapatkan

didunia perkuliahan yang kemudian penulis tuangkan kedalam bentuk skripsi.

3. Manfaat bagi peneliti selanjutnya

Penulis mempunyai besar harapan untuk dapat membantu peneliti selanjutnya dengan bentuk referensi ataupun informasi yang dapat diambil dalam penelitian yang akan penulis lakukan atau penulis teliti.

G. Sistematika Kepenulisan

Sistematika kepenulisan ini bertujuan untuk dapat memberikan kemudahan pemahaman bagi pembaca mengenai penelitian yang dilakukan. Maka penulis dalam menyusun skripsi menggunakan sistematika yang diurai seperti berikut ini:

BAB 1 PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan uraian dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika kepenulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bab kedua ini membahas serta menjelaskan secara lebih rinci tentang landasan suatu teori terkait Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), *Good Governance* serta Kualitas Kinerja Aparatur Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan, selain itu terdapat penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam metode, penelitian ini akan menjelaskan dan mengurai terkait tempat dan waktu penelitian, metode penelitian, populasi dan sample, jenis dan sumber data, dan teknik pengumpulan serta teknik analisis data dengan menggunakan berbagai uji menggunakan aplikasi EViews 12.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab keempat ini menjelaskan terkait deskripsi data hasil penelitian variabel, analisis hasil penelitian, pengujian hipotesis dan pembahasan penelitian.

BAB V PENUTUP

Dalam bab kelima ini berisi kesimpulan dari penelitian dan saran.



UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON